

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
*ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Kasus pada Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang  
ada di Indonesia periode 2016-2019)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S1

**Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh :

**Zulfikar Sofyanto**

**NIM : 31401700317**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2021**

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016-2019)**

Disusun oleh :

**Zulfikar Sofyanto**

**Nim: 31401700317**

Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 26 maret 2021  
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Digitally signed by Sri Sulistyowati  
20 April 2021, 21:07:54  
EY 2010040100001

Fakultas Ekonomi  
Program Studi Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang

**Sri Sulistyowati, SE., M.Si, Akt**

**NIK. 211403017**

Penguji I



19/04/2021

**Dr. H. Kiryanto, SE, M.Si., Akt. CA**

**NIK. 211492004**

Penguji II



Digitally signed by Khoirul Fuad, SE.,  
M.Si, Ak, CA

DN: cn=KhoirulFuad, SE, M Si, Ak, CA,  
o=Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang, ou=Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi,  
email=khofuad@unissula.ac.id, c=ID

**Khoirul Fuad, SE, M.Si, Ak, CA**

**NIK. 211413023**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Akutansi tanggal 26 maret 2021  
Ketua Program Studi Akuntansi



**Dr. Dra Winarsih, M.Si**  
**NIK. 211415029**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfikar Sofyanto

NIM : 31401700317

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia Periode 2016-2019)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



**Zulfikar Sofyanto**  
NIM.31401700317

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Usaha kecil yang terus menerus pasti akan membuahkan hasil”

“dan Allah Pemberi Rezeki yang terbaik.” (Q.S Al-Jumu’ah:11)

### PERSEMBAHAN:

“Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan.”

“Kedua orang tuaku tercinta Bapak Haryanto dan Ibu Supiyatu yang selalu memotivasi dan mendoakan saya selalu.”

“Adik-adiku (Diva da Al-Battar) yang selalu memberikan semangat dalam bentuk apapun”

“Kepada dosen pembimbing saya Ibu Sri Sulistyowati yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dengan sabar dan sepuh hati.”

“Kepada teman-teman seangkatan, sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat.”

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016 – 2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan terpilih 10 perusahaan dengan total sampel 40 data penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good corporate governance* pada proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan variabel *Islamic corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

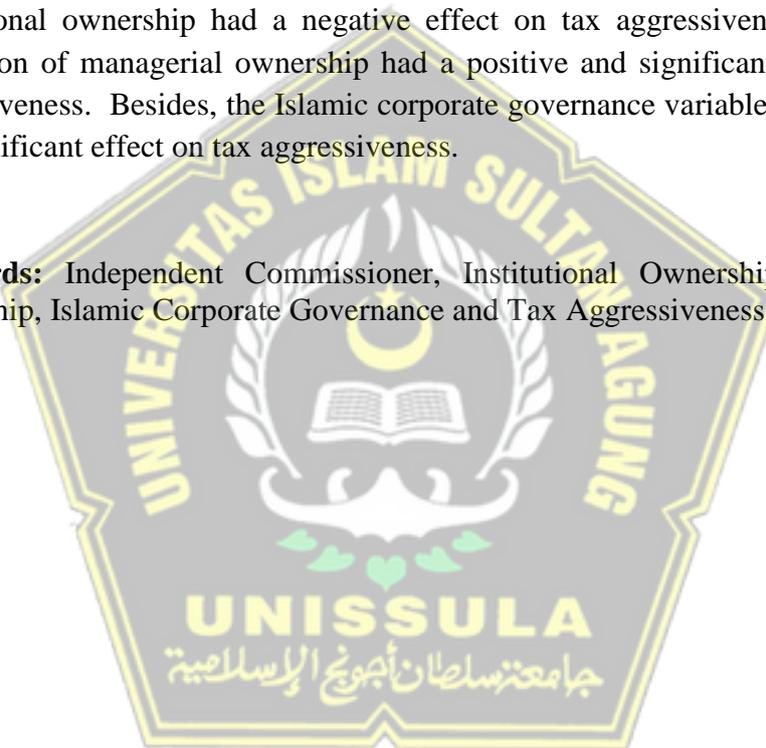
**Kata Kunci :** Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, *Islamic Corporate Governance* dan Agresivitas Pajak.



## ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance and Islamic Corporate Governance on Tax Aggressiveness. The population in this study is a Sharia Commercial Bank (BUS) companies in Indonesia for the period 2016 - 2019. A purposive sampling method used in this study. 10 BUS companies were selected with a total sample of 40 research data. The multiple linear regression analysis techniques were used for data analysis. This study reveals that that good corporate governance on the proportion of independent commissioners and institutional ownership had a negative effect on tax aggressiveness, while the proportion of managerial ownership had a positive and significant effect on tax aggressiveness. Besides, the Islamic corporate governance variable had a positive and significant effect on tax aggressiveness.

**Keywords:** Independent Commissioner, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Islamic Corporate Governance and Tax Aggressiveness.



## INTISARI

Penelitian ini mengungkapakan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Islamic Corporate Governance dalam suatu tindakan Agresivitas pajak pada perusahaan. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara agresif.

Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis, yaitu : a) komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, b) kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, c) kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, d) Islamic corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia dengan periode 2016-2019. Metode yang di pakai dalam pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Dari 14 perusahaan amatan terdapat sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Regresi Linear Berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis, menggunakan SPSS 16 dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* pada proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan pada proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dan *Islamic Corporate Governane* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, dan anugrah yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016-2019)”. Peneliti menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Winarsih, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Sri Sulistyowati, SE., M.Si, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sabar membimbing, motivasi, dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak dan Ibu Staff serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.
6. Kepada Bapak dan Ibu saya yang tak pernah berhenti mendoakan untuk anaknya dan selalu memberikan semangat setiap hari.
7. Kepada Adik saya yang selalu memberikan semangat.

8. Teman-teman kelas seperjuanganku satu angkatan FE akutansi. Terima kasih atas kebersamaan kita selama menempuh pendidikan di kampus ini.
9. Teman-temanku Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 2017.
10. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang kalian berikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Namun besar harapan peneliti semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
INTISARI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Keagenan .....	8
2.2. Variabel-variabel penelitian .....	9
2.2.1. <i>Good Corporate Governance</i> .....	9
2.2.1.1 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	12

2.2.2 <i>Islamic Corporate Governance</i> .....	15
2.2.2.1 Prinsip <i>Islamic Corporate Governance</i> .....	17
2.2.3 Agresivitas Pajak .....	19
2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis	26
2.4.1 Pengembangan Hipotesis.....	26
2.4.1.1 Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak .....	26
2.4.1.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak .....	27
2.4.1.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak .....	28
2.4.1.4 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak .....	30
2.4.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	36
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Populasi dan Sample.....	36
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5 Variabel dan indikator .....	38
3.5.1 Variabel terikat (Dependen) .....	38
3.5.2 Variabel bebas (independen) .....	39
3.5.2.1 Proporsi komisaris independen.....	39
3.5.2.2 Proporsi Kepemilikan Institusional .....	40

3.5.2.3 Proporsi Kepemilikan Manajerial.....	40
3.5.2.4 Variabel <i>Islamic Corporate Governance</i> .....	41
3.6 Teknik Analisis.....	44
3.6.1 Uji Asumsi Klasik .....	45
3.6.1.1 Uji Normalitas .....	45
3.6.1.2 Uji Multikolinieritas .....	45
3.6.1.3 Uji autokorelasi.....	46
3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas .....	47
3.6.2 Statistik Deskriptif.....	47
3.6.3 Analisis regresi linier berganda.....	48
3.6.4 Uji Hipotesis.....	48
3.6.5 Uji Silmultan (Uji F).....	49
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	54
4.3.1 Uji Normalitas .....	54
4.3.2 Uji Multikolinieritas .....	55
4.3.4 Uji Autokorelasi .....	56
4.3.5 Uji Heterokedastisitas.....	58
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
4.4.1 Persamaan Regresi Linear Berganda.....	59

4.5 Pengujian Hipotesis (Uji t) .....	61
4.6 Uji simultan (Uji F) .....	63
4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
4.8 Pembahasan .....	65
4.8.1 Pengaruh Komisaris independen terhadap Agresivitas Pajak .....	65
4.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak .....	66
4.8.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap agresivitas pajak.....	67
4.8.4 <i>Islamic Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak.....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Keterbatasan .....	71
5.3 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel.....	43
Tabel 4.1 Distribusi Sampel.....	51
Tabel 4.2 Deskriptive Statistik.....	52
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas.....	56
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	57
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda.....	59
Tabel 4.8 Uji Hipotesis t.....	61
Tabel 4.9 Uji Simultan F.....	63
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 ..... 34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Cek List Data .....	79
Lampiran 2. Hasil SPSS 2016 .....	79
Lampiran 3. Tabulasi Data .....	82



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu elemen sumber pendapatan negara dalam perekonomian Indonesia. Pendapatan negara sendiri memiliki peran untuk membiayai dan menjalankan program suatu Pemerintahan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penghasilan dari sektor pajak berasal dari sumbangan wajib rakyat, yang telah di atur dan di tetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”. Akan tetapi, pajak merupakan beban bagi suatu perusahaan. Sehingga ada upaya tindakan – tindakan perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan oleh suatu perusahaan atau yang di sebut sebagai Agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan untuk mengurangi pajak dengan menggunakan metode yang di golongan sebagai penggelapan pajak ataupun bukan (Salman et al., 2018).

Tindakan Agresivitas pajak merupakan upaya yang di lakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang di bayarkan. Adanya perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan sebagai wajib pajak memunculkan kemungkinan adanya tindakan-tindakan untuk mengurangi beban pajaknya. Pajak adalah merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi nilai laba. Oleh karena itu , perusahaan berupaya melakukan tindakan-tindakan perlawanan pajak.

Dalam suatu perusahaan perbankan syariah khususnya bank umum syariah tentunya selalu menginginkan laba yang besar, akan tetapi laba yang besar akan menimbulkan konsekuensi di kenakan beban pajak yang besar. Hal ini yang menyebabkan suatu bank syariah akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal merupakan tindakan yang agresif, untuk mencari strategi yang legal (diperbolehkan) dalam rangka meminimalkan pajak yang seharusnya dibayar. Salah satu strategi yang dilakukan dapat ditinjau melalui penerapan *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik, dimana prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha. Salah satu cara untuk mengurangi agresivitas pajak di butuhkan *Good Corporate Governance* yang baik di perusahaan. Akan tetapi sebaliknya, salah satu penyebab perusahaan melakukan Agresivitas pajak yakni lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menginvestigasi hal-hal yang berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak. (Setu, Endang, 2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017. Hasilnya menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* pada komisaris

independen proksi dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan proksi lainnya adalah kepemilikan insitusi dan kualitas audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

(Indra Gunawan, Mukhzarudfa, 2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji apakah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) mampu untuk meminimalkan penghindaran pajak perbankan pada sektor bank syariah di Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh besar pada pajak penghindaran perbankan syariah di Indonesia, sedangkan kualitas auditor tidak berpengaruh dalam pembuatan kebijakan yang ada terkait dengan penghindaran pajak.

Selanjutnya, (Salman et al., 2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat tata kelola Islam terhadap tingkat agresivitas pajak pada sektor bank syariah di Indonesia pada periode 2010-2016. Hasil penelitian mereka membuktikan pengaruh tingkat tata kelola Islam terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin baik penerapan tata kelola Islam dijalankan oleh bank syariah, semakin tinggi jumlah beban pajak dan beban pajak saat ini yang harus dibayar bank syariah, dengan kata lain semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dijalankan bank syariah. Sebaliknya, semakin buruk penerapan tata kelola Islam yang dijalankan oleh bank syariah, semakin rendah jumlah beban pajak dan beban pajak saat ini yang harus dibayar oleh bank syariah, dengan kata lain semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

Selain ketiga penelitian di atas, pada tahun 2018 (Arinta, 2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan islami pada penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia selama periode 2013-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa unsur-unsur tata kelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris, rapat dewan komisaris, dewan syariah, rapat dewan syariah, komite audit, rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap aktivitas pajak penghindaran yang diukur menggunakan kesenjangan pajak buku. Hasil-hasil lain menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak yang diukur dengan kesenjangan pajak buku tidak dipengaruhi secara signifikan oleh rapat dewan komisaris.

Hasil penelitian yang inkonsisten dari beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tingkat agresivitas pajak diatas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap tingkat agresivitas pajak. Selain melakukan investigasi ulang tentang pengaruh *Good Corporate Governance* pada tingkat agresivitas pajak, penelitian ini juga akan meneliti pengaruh variabel *Islamic Corporate Governance* sebagai variabel yang berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak. Mengingat obyek penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, akan sangat menarik untuk menggali bagaimana pengaruh *Islam Corporate Governance* pada tingkat agresivitas pajak.

*Islam Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam (Chintya Zara Ananda & Erinos NR, 2020) dimana prinsip yang mendasari kegiatan bisnis dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang

dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai Islam. Prinsip ini di atur dalam hukum kaidah islam atau syariah dalam mengatur semua aspek pada kegiatan operasional perusahaan, dimana setiap tindakan perusahaan harus sesuai syariah dengan mematuhi standar etika yang di tetapkan dalam islam.

Penerapan konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) di Indonesia diakomodasi dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Pelaksanaan tata kelola perusahaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Penerapan *Islamic Corporate Governance* dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan tata kelola perusahaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan.

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan jurnal utama yang sebagai acuan yang telah di lakukan penelitian oleh (Setu, Endang, 2019) dengan judul “pengaruh kebijakan keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2017”, maka dalam penelitian ini akan mengkaji ulang mengenai tata kelola perusahaan yang mempengaruhi agresivitas pajak, dengan judul **“Pengaruh Good Corporate**

***Governance (GCG) dan Islamic corporate Governance (ICG) terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016-2019”.***

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan jurnal utama meliputi variabel bebas yaitu adanya penggabungan variabel *Islamic Corporate Governance* yang sebagai nilai ilham terkait tata kelola perusahaan, dalam penelitian ini populasi yang akan di lakukan penelitian pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di Indonesia, dan pengukuran variabel agresivitas pajak menggunakan metode *Effective Tax Rate (ETR)*.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak diperbolehkan adanya praktik riba serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (Rayhan et al., 2017).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak pada Bank Syariah.
- b) Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak pada Bank Syariah.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Good corporate Governance* ( GCG ) terhadap Agresivitas pajak pada bank Syariah .
- b) Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Islamic Corporate Governance* ( ICG ) terhadap Agresivitas Pajak pada Bank Syariah.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akutansi perpajakan, khususnya tentang Agresivitas pajak.

- 2) Manfaat praktis

Bagi perusahaan perbankan syariah khususnya bank umum syariah hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan masukan mengenai peran *Good Corporate Governance* ( GCG ) dan *Islamic Corporate Governance* ( ICG ) terkait Agresivitas Pajak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (*Agency Theory*) atau biasa di sebut Teori Keagenan.

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemegang saham (*Principal*) dan manajemen (*Agen*). Jensen dan Meckling (1976), menyebutkan bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara manajer (*Agen*) dan pemegang saham (*Principal*), (Yunistina & Tahar, 2017).

Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen sebagai pengelola perusahaan untuk menghasilkan return yang baik bagi pemegang saham. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus melaporkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemegang saham. Akan tetapi ketika manajemen dan pemegang saham belum ada keselarasan dan masih ada keinginan untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Maka ada kemungkinan manajemen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara keduanya yang di asumsikan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang di inginkan.

Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan disebut sebagai *Agency Problem*, masalah keagenan mungkin terjadi ketika ada perbedaan dalam kepentingan manajemen dan pemegang saham ketika pemegang saham memiliki perilaku penghindaran pajak yang agresif. Kondisi ini terjadi ketika manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham ingin mengurangi biaya pajak melalui laba yang lebih rendah. Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik agresivitas pajak juga memiliki tujuan meraih keuntungan, salah satunya adalah menghemat pengeluaran atas pajak agar keuntungan pengusaha semakin besar. Keuntungan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, agresivitas pajak bisa meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Salah satu cara yang digunakan terkait konflik di atas dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah dengan adanya *corporate governance* (tata kelola perusahaan).

## **2.2. Variabel-variabel penelitian**

### **2.2.1. Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah struktur, system, dan proses yang di gunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta akuntabilitas perusahaan yang memiliki tujuan untuk mempertinggi nilai saham yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Yunistina & Tahar, 2017). Secara teoritis *Good Corporate Governance*

bukan suatu hal yang baru bagi manajemen perusahaan, pada awalnya konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* paska krisis. *Good Corporate Governance* merupakan suatu konsep tata cara kelola perusahaan yang sehat dan di harapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan peraturan, hukum, dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut OECD (*organisation for economic co-operation and defelopment*) *Good Corporate Governance* sebagai suatu system untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban kepada pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. (Njatrijani et al., 2019)

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menjelaskan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara manajer, pemegang saham, kreditor, karyawan, pemerintah dan stakeholder internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau system dimana perusahaan

diarahkan dan dikendalikan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan (FCGI, 2002).

Berdasarkan SK Menteri (177/M-MBU/, 2002), *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN sebagai meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan (*stakeholder*) pemangku kepentingan lainnya, yang berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

*Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *Good Corporate Governance* dalam (Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI, 2009) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* adalah sebagai sistem hukum menjalankan kewenangan dan kontrol praktik bisnis perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar. Komponen utama didalam *Good Corporate Governance* adalah manusia yang dikelompokkan ke dalam beberapa jabatan/fungsi/organ. beberapa kelompok organ dengan fungsinya masing-masing di *Good Corporate Governance*, yaitu :

CEO (*Chief Executive Officer*) yang berfungsi *enforcement*, (BOD) *Board Of Directors* yang berfungsi *oversight*, BOC (*Board Of Commisionner*) yang berfungsi memonitoring. Setiap pihak dalam fungsinya masing-masing saling

berinteraksi tentunya dalam mencapai tujuan *Good Corporate Governance*. Proporsi *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Dalam sektor perbankan syariah, penerapan *Good Corporate Governance* telah diatur oleh bank indonesia melalui dikeluarkannya (Peraturan Bank indonesia no. 11/33/PBI, 2009). Dalam membangun industri perbankan syariah yang sehat, serta upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* Bank Indonesia mengeluarkan PBI (peraturan bank indonesia) dalam upaya meningkatkan kepatuhan umum pada perbankan syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap kegiatan usahanya bank diwajibkan melaksanakan *Good Corporate Governance* yang tercantum dalam PBI pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "Bank wajib melaksanakan good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi". Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting guna menjamin akuntabilitas yang sehat dalam perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai tata kelola yang baik apabila setiap proses pengungkapan dan transparansi di patuhi.

#### **2.2.1.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance**

Dalam penerapannya untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga *Good Corporate Governance* bisa terlaksanakan dengan baik, ada 5 prinsip-prinsip *Good*

*Corporate Governance* menurut Peraturan Bank Indonesia (No.8/4/PBI/, 2006) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, diantaranya:

1. *Transparansi (Transparency)*, secara sederhana bisa di artikan sebagai keterbukaan informasi. Pejabat internal perusahaan beserta seluruh jajaran staff harus bisa mengemukakan informasi dengan jelas, lugas, dan akurat. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Semua kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan dan didata dengan akurat kepada jajaran pemegang saham yang berhak atas informasi tersebut. Dan tentunya juga menjadikan para investor lebih mudah dalam mengakses informasi penting perusahaan pada saat diperlukan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).
2. *Akuntabilitas (Accountability)*, yakni terkait dengan kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Dalam pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili

oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*, secara sederhana dapat di artikan sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.
4. *Kemandirian (Independency)*, adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Independency* penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*, Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati,

sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Penerapan *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu di perusahaan-perusahaan di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

### **2.2.2 Islamic Corporate Governance**

*Islamic Corporate Governance* menurut (Endraswati, 2015) *Corporate Governance* dalam islam adalah system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemology sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah.

Menurut Bhatti & Bhatti (2009) dalam (Chintya Zara Ananda & Erinors NR, 2020) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam, di mana kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, menurut (Fadhistri et al., 2019) *Islamic Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang idealnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan mengkomodasikan seluruh pemangku kepentingan secara adil, Dengan adanya dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah.

*Islamic Corporate Governance* memaparkan suatu tatanan yang unik yang menggabungkan antara unsur tauhid dan aturan syariah. Di dalam Islam kegiatan sehari-hari seseorang harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, keadilan, dan rasa tanggung jawab tentunya berlaku dalam sebuah transaksi maupun operasional di perusahaan. Nilai-nilai tersebut harus di wujudkan dalam individu maupun kelompok pada kegiatan usaha dan operasional serta hubungan mereka dengan *stakeholder* masing-masing. Dalam hal tersebut, *Islamic Corporate Governance* mengejar tujuan yang sama seperti *Good Corporate Governance*, namun lebih ke dalam kode moral berbasis agama Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Islamic corporate governance* merupakan turunan konsep dari *Good Corporate Governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan *Good Corporate Governance*. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam (International et al., 2018).

Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah nonbank merupakan contoh perusahaan yang menerapkan konsep *Islamic Corporate Governance*. Dalam tata kelola perusahaan hal yang membedakan pada sektor perbankan syariah dalam penerapan *Islamic Corporate*

*Governance* yaitu dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, yang tentunya tidak terdapat di dalam perbankan konvensional dalam struktur tata kelola perusahaan. tentang pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* bagi Bank Syariah, proporsi Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi/wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

### **2.2.2.1 Prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance**

Dalam menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umatnya, para rasul dibekali dengan empat sifat wajib yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan Fathanah. Keempat sifat wajib rasul tersebut menjadi sifat kepemimpinan dalam Islam (Endraswati, 2015). Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* tidak jauh beda dengan *Good Corporate Governance*, seperti yang kita ketahui bahwa dalam *Good Corporate Governance* memiliki beberapa prinsip antara lain *transparacy*, *responsibility*, *akuntability*, *indepensi*, dan *fairness*. Jika kita kaitkan kedalam nilai islam *transparacy* merujuk pada nilai shiddiq, *akuntability* merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah, *fairness* merujuk pada shiddiq dan amanah. Akan tetapi hal yang perlu di garis bawahhi meskipun *Islamic Corporate Governance* tercakup dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama, karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinyaapun akan berbeda.

4 sifat-sifat wajib rasul yang menjadi prinsip dan di jabarkan dalam konsep *Islamic Corporate Governance* yang di dasarkan pada hukum Al Qur'an dan Hadist. Berikut di antaranya:

- 1) Shiddiq, yang berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini akan merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *corporate governance*, *Islamic Corporate Governance* menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan, dimana agar tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan di suatu perusahaan maka akan menjadikan perusahaan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kedzaliman.
- 2) Tabligh, yang berarti menyampaikan. Dalam konteks menyampaikan kebenaran. Jikalau pada zaman dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah SWT, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran, Allah SWT memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.
- 3) Amanah, yang berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggungjawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-

baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi, sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahaan.

- 4) Fathanah, yang berarti cerdas. Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang di ikuti. Suatu perusahaan pastinya membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Sifat fathanah akan mendukung ketiga sifat lain dalam *Islamic Corporate Governance*. Karena dengan sifat fathanah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual.

### 2.2.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan Lanis dan Richardson 2012, dalam

(Goh, Nainggolan & Sagala, 2019). Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan baik secara legal maupun illegal guna mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal (Maulana, 2020).

Selanjutnya, Agresivitas Pajak menurut Frank, Lego dan Lynch 2009, dalam (Yunistina & Tahar, 2017) mendefinikan agresivitas pajak sebagai tindakan yang menciptakan rekayasa beban pajak atau pajak yang di bayar dengan cara mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau dengan cara illegal (*tax evasion*).

Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi, salah satunya dilakukan dengan memperbesar jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau memperkecil pendapatan, sehingga jumlah beban pajak yang di bayarkan rendah. Perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang (UU) maupun peraturan perpajakan lainnya, kelemahan tersebut yakni adanya celah atau kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Suatu perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik menggunakan cara yang tergolong legal yakni *tax avoidance* atau ilegal seperti *tax evasion*. Walau tidak semua tindakan perencanaan pajak

dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala ETR (*Effective Tax Rate*) / ETR GAAP yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur, salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh (Arinta, 2018). Di banding dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*), ETR GAAP lebih merujuk kepada presentasi besaran tarif pajak yang di tanggung oleh perusahaan, besaran ETR GAAP dapat di hitung dari jumlah beban pajak kini dibagi dengan laba komersial sebelum pajak. ETR GAAP dapat mencerminkan persentase kewajiban pajak yang sebenarnya dengan laba akuntansi yang di hasilkan oleh perusahaan.

ETR GAAP digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan perusahaan. Rentang nilai ETR GAAP dapat mengidentifikasi adanya agresivitas pajak atau tidak. Contohnya, ETR GAAP yang rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak. Beberapa perusahaan-perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga memiliki nilai ETR GAAP yang lebih rendah, semakin rendah nilai ETR GAAP maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut agresif. Dengan demikian, ETR GAAP dapat difungsikan untuk mengukur Agresivitas Pajak.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah sudah di lakukan terkait agresivitas pajak. Beberapa penelitian tersebut teringkas dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Setu Setyawan, Endang Dwi Wahyuni, & Ahmad Juanda, (2019).	Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak.	Good Corporate Governance pada proksi Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Proksi Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit tidak Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.	Ruth Rogate Octaviani & Sofie, (2018).	Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.	Hasil penelitian ini Good corporate Governance pada proksi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
3.	Jeane Atari (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan kebijakan hutang terhadap <i>Tax Agressive</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013).	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax aggressive</i> , Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax aggressive</i> , dan kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressive</i> .
4.	Devan danny Rosidy & Rahadi Nugroho, (2019).	Pengaruh Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu,

			variable komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5.	Yusvita Nena Arinta, (2018).	Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance.	Islamic Corporate Governance pada proksi Dewan Komisaris, Dewan Syariah, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
6.	M.Indra Gunawan, H. Mukhzarudfa, dan Ilham Wahyudi, (2019).	Pengaruh penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013 – 2017.	Good Corporate Governance pada proksi Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Agresivitas Pajak), sedangkan proksi Kualitas Auditor tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

7.	Agung Wibawa, Wilopo, & Yusri Abdillah, (2016).	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014).	Good Corporate Governance pada proksi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara parsial proksi dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak, proksi Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	Kautsar Riza Salman, Muslich Anshori & Heru Tjaraka, (2018).	THE NEW INFLUENCE OF THE LEVEL OF ISLAMIC GOVERNANCE TO THE LEVEL OF TAX AGGRESSIVENESS AND LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Pengaruh baru tingkat pemerintahan islam terhadap tingkat keagresifan pajak dan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan)	Islamic corporate governance berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin rendahnya tingkat penerapan tata kelola Islam akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya, penerapan Islamic governance yang lebih baik akan berdampak pada penurunan tingkat agresivitas pajak.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **2.4.1 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas, dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan pengawas syariah, dan komposisi dewan pengawas syariah terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka teoritis yang di paparkan sebelumnya maka dapat dikembangkan sebagai berikut :

#### **2.4.1.1 Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak**

Komisaris Independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang berasal dari pihak independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (Yunistina & Tahar, 2017). (Nugroho & Rosidy, 2019) menyebutkan komisaris independen memiliki peran sebagai pihak professional yang mengawasi para manajemen level tinggi di perusahaan dalam pencapaian memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Keberadaan komisaris independen pada perusahaan memberikan manfaat bagi suatu perusahaan dalam menjaga independensi perusahaan melalui pengawasan dan pemberian nasihat sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan, pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. komisaris independen berperan untuk menjaga independensi bilamana pihak manajemen dan pihak pemilik memiliki tujuan yang merugikan banyak pihak dan benturan

kepentingan. Tentunya sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Sehingga menjadi tugas utama bagi komisaris independen untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh (Setu, Endang, 2019) yang menghasilkan penelitian bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan menurut (Nugroho & Rosidy, 2019) yang melakukan penelitian dengan 2 model (ETR1) yang menghasilkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan (ETR2) yang menghasilkan komisaris independen berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Atas dasar definisi dan beberapa hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.1.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi (Indra Gunawan, Mukhzarudfa, 2019). Kepemilikan saham oleh pihak institusional dalam perusahaan memiliki peran yang penting dalam mengawasi, memantau, mempengaruhi bahkan mendisiplinkan tindakan yang harus diambil oleh pihak manajer (Dridi & Boubaker, 2015).

Dapat di jelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang di ambil oleh manajer secara efektif. Dengan demikian, pihak manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan juga bertindak dalam melakukan kecurangan salah satunya tindakan agresivitas pajak. Teori tersebut di dukung dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh (Indra Gunawan, Mukhzarudfa, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. Atas definisi dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.1.3 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak**

Kepemilikan dipisahkan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dan dijelaskan dalam teori agensi akan menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan dalam memaksimalkan utilitasnya masing - masing. Oleh sebab itu, harus diperlukannya suatu mekanisme pengendalian yang mampu menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan adanya kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direksi, komisaris, manajer, maupun

karyawan) yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Maraya & Yendrawati, 2016)

Pada kepemilikan manajerial, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola namun juga sebagai pemegang saham. Dalam hal ini manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dikarenakan apabila keputusan yang diambil salah, maka pihak manajemen juga akan ikut menanggung kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, apabila keputusan yang di ambil benar, maka manajemen juga akan merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya kepemilikan saham manajerial, manajer perusahaan akan cenderung untuk mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan mengambil risiko terkait dengan permasalahan perpajakan. Dimana permasalahan perpajakan yang mungkin dialami perusahaan akan memberikan citra buruk baik dari negara maupun masyarakat yang tentu saja akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Artinya kepemilikan saham manajerial cenderung mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak guna mempertahankan kelangsungan usahanya. Maka dapat kita simpulkan dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin rendah. Sesuai definisi dan uraian di atas hipotesis yang akan di ajukan dalam proporsi kepemilikan manajerial adalah :

H<sub>3</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **2.4.1.4 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak**

*Islamic Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan dengan penerapan prinsip ekonomi Islam yang mengakomodasikan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip syariah, dan dengan adanya keberadaan dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut (Lidyah et al., 2017) *Islamic Corporate Governance* direpresentasikan dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, keterpadangan dewan pengawas syariah, dan lintas anggota dewan pengawas syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank syariah setara dengan dewan komisaris, dimana memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan memperingatkan pihak manajemen bank syariah tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen dalam kaitanya dengan kepatuhan prinsip syariah (Haribowo, 2016). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (International et al., 2018)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang di bentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah maka perusahaan akan selalu dalam pengawasan bila mana ada tindakan-tindakan kecurangan yang bertentangan dengan nilai islam salah satunya agresivitas pajak.

Artinya dengan adanya Dewan pengawas syariah, maka di duga bahwa dewan pengawas syariah dapat melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan agresivitas pajak.

Jumlah Anggota Dewan Pengawas yakni semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah akan meningkatkan pengawasan pada suatu Bank Syariah (Arinta, 2018). Bank Indonesia menetapkan minimal jumlah dewan pengawas syariah adalah sebanyak dua anggota. Akan tetapi semakin banyak jumlah anggota maka akan meningkatkan pengawasan pada perusahaan. Dewan pengawas syariah akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik dan banyak dengan jumlah yang lebih besar. Dengan lebih banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan lebih banyak ide dan pandangan dari anggota dewan pengawas syariah untuk menerapkan hukum dan prinsip Islam di dalam perbankan syariah.

Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah menjelaskan tentang semakin baik tingkat pendidikan yang diperoleh oleh dewan pengawas maka semakin bisa dewan pengawas melakukan sebuah inovasi (Lidyah et al., 2017). Dewan pengawas syariah tidak hanya memahami mengenai prinsip syariah tetapi juga tentang hukum dan ekonomi karena itu saling berkaitan (Haribowo, 2016). dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah, maka dewan pengawas syariah dapat memilih dan memastikan apakah suatu peraturan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Lebih dari itu, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki oleh anggota dewan pengawas syariah maka ia dapat mengaplikasikan kemampuan teori yang dimiliki

kedalam peraturan syariah. Pada akhirnya anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan turut memberikan peraturan yang lebih ketat terhadap ketaatan prinsip syariah dan secara langsung tindakan-tindakan kecurangan yang bertentangan dengan nilai islam terkait agresivitas pajak dapat terkondisikan.

Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah yakni keterpandangan atau reputasi anggota dewan pengawas syariah dapat menandakan bahwasanya dewan pengawas syariah memiliki pengalamandan pengetahuan yang cukup mengenai prinsip syariah dalam ekonomi. Hal ini dikarenakan anggota dewan pengawas syariah yang memiliki keterpandangan ikut tergabung menjadi pengurus didalam organisasi-organisasi yang besar yang konsen terhadap prinsip syariah. Maka dengan beberapa representasi yang di jabarkan di atas keterpandangan anggota dewan pengawas menjadikan penerapan *Islamic Corporate Governance* akan semakin tinggi dan tindakan-tindakan agresivitas pajak dapat terkondisikan.

Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah yakni adanya situasi rangkap jabatan dimana anggota dewan pengawas syariah menjadi dewan pengawas syariah di bank syariah lain, hal ini akan menjadikan pengawasan perbankan menjadi lebih transparan disebabkan oleh : (a) anggota yang termasuk dalam lintas anggota akan membandingkan pengetahuan mereka dari perbankan yang satu terhadap perbankan lainnya, (b) peraturan pada perbankan yang satu akan dijadikan pertimbangan pada pembuatan peraturan pada perbankan yang lainnya (Lidyah et al., 2017). Anggota dewan pengawas syariah yang termasuk dalam

lintas anggota akan lebih banyak berdiskusi dan menganalisis karena pengalaman mereka tentang penerapan prinsip Islam pada perbankan syariah.

Dengan meningkatnya pengalaman dan dapat membandingkan antara peraturan suatu perbankan syariah dengan perbankan syariah lainnya maka akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap perbankan syariah yang tentunya tindakan agresivitas pajak dapat terkondisikan.

Hasil uraian diatas didukung dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh (Arinta, 2018) yang menghasilkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dengan penjelasan degan adanya keberadaan dewan pengawas syariah, semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah, semakin tinggi tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, semakin baik reputasi dewan pengawas syariah dan semakin banyak lintas anggota dewan pengawas syariah, maka akan semakin memperkuat pengawasan dan konsisten dalam menerapkan prinsip islam, dengan demikian dapat memperketat pengawasan dalam mengontrol perbankan syariah sehingga tindakan agresivitas pajak dapat terkondisikan. Maka hipotesis yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub>: *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

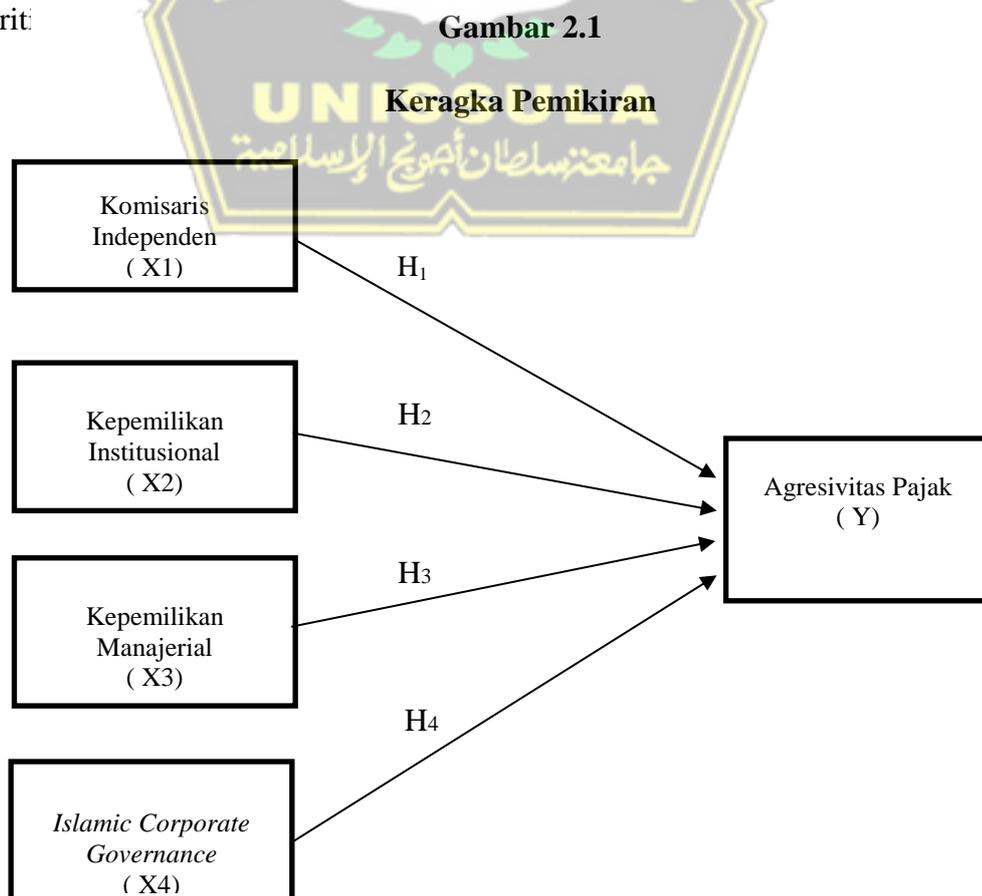
#### **2.4.2 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang telah di uraikan di atas, maka tebentuklah kerangka pemikiran

teoritis dari dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dan islamic corporate governance terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini dapat di jelaskan atau di gambarkan bagaimana hubungan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dengan proporsi komisaris independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), kepemilikan manajerial ( $X_3$ ) dan *Islamic Corporate Governance* ( $X_4$ ) terhadap variable dependen agresivitas pajak (Y).

Dengan adanya variabel variabel di atas maka disusunlah sebuah kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan mengenai *Good Corporate Governance* dengan proporsi komisaris independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), kepemilikan manajerial ( $X_3$ ) dan *Islamic Corporate Governance* ( $X_4$ ) yang mempengaruhi agresivitas pajak (Y). Berikut merupakan gambaran kerangka pikir teoriti:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis datanya adalah data sekunder yang di peroleh di website resmi Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di indonesia.

Objek yang terkandung dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* dengan proporsi meliputi komisariss independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Variable bebas selanjutnya adalah *Islamic Corporate Governance* dengan proporsi meliputi dewan pengawas syariah, Komposisi keahlian dewan pengawas syariah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang akan di lakukan pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.

#### **3.2 Populasi dan Sample**

Populasi penelitian ini yakni pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada OJK yang ada di Indonesia yang meliputi: Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank MyBank Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Dalam

penelitian ini ada sepuluh Bank Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memenuhi kriteria dan akan menjadi sampel, dan sepuluh bank tersebut sudah menerbitkan laporan keuangan tahunan untuk periode 2016-2019.

Metode dalam pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria yang telah ditentukan (Nuradila & Wibowo, 2018). Adapun beberapa karakteristik pemilihan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini :

1. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*), selama periode 2016 hingga 2019.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, agar peneliti tidak menyesuaikan tingkat kurs di setiap tahunnya, dan supaya kriteria pengukuran nilai mata uangnya tidak berbeda.
3. Perusahaan menyajikan data perusahaan yang lengkap dan jelas berkaitan dengan variabel penelitian.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana data yang di peroleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder ditunjukkan untuk memperoleh data tentang *Good Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Governance* yang mempengaruhi Agresivitas Pajak.

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui website Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2016-2019.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan Metode dokumentasi. Dimana peneliti mengumpulkan data yang di perlukan melalui pengambilan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, yang telah di publikasikan melalui *website* perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumen yang akan di gunakan pada penelitian ini seperti dokumen laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia.

### **3.5 Variabel dan indikator**

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas (*independen*) dan variable terikat (*dependen*).

#### **3.5.1 Variabel terikat (Dependen)**

Variabel terikat adalah variable yang di pengaruhi atau akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Agresivitas pajak. Dalam penelitian ini variabel Agresivitas pajak di ukur menggunakan skala *Effective Tax Rate* (ETR/ ETR GAAP), ETR GAAP adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

ETR GAAP digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR GAAP menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajaktangguhan. ETR GAAP digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Dimana semakin kecil nilai ETR GAAP mengindikasikan semakin besar tingkat agresivitas pajak dan sebaliknya semakin besar nilai ETR GAAP menindikasikan semakin rendah tingkat agresivitas pajak (Gunawan, 2017). ETR GAAP yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan formula yang di gunakan dalam penelitian (Arinta, 2018) yaitu di rumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ETR GAAP} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Penghasilan sebelum pajak}}$$

### 3.5.2 Variabel bebas (independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah good corporate governance meliputi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan Islamic corporate governance meliputi dewan pengawas syariah, komposisi keahlian dewan pengawas syariah. Berikut adalah uraian variable bebas dalam penelitian ini :

#### 3.5.2.1 Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen di ukur dengan berdasarkan presentase

jumlah dewan komisaris terhadap total komisaris yang terdapat dalam jajaran dewan komisaris perusahaan perbankan syariah. Komisaris independen dalam penelitian ini di ukur menggunakan formula yang di gunakan dalam penelitian (Arinta, 2018) yaitu di rumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

### 3.5.2.2 Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang di miliki oleh lembaga atau institusi yang mendirikan perusahaan. Kepemilikan institusional di duga dapat mempengaruhi kebijakan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan. Kepemilikan institusional pada penelitian ini di ukur menggunakan formula yang di gunakan dalam penelitian (Octaviani & Sofie, 2019) yaitu di rumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham intitusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### 3.5.2.3 Proporsi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola. Dalam proporsi kepemilikan Manajerial pada penelitian ini di ukur menggunakan formula yang di gunakan dalam penelitian (Octaviani & Sofie, 2019) yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Proporsi Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 3.5.2.4 Variabel *Islamic Corporate Governance*

Dalam variabel *Islamic corporate governance* pada penelitian ini menerapkan mekanisme skor-ICG. Dalam pengukuran *Islamic corporate governance* dengan sebagaimana yang sudah telah di lakukan pada penelitian (Haribowo, 2016) dengan menggunakan ICG-skor, ICG-skor dalam penelitian ini di dasarkan pada keberadaan dewan pengawas syariah, jumlah anggota dewan pengawas syariah, kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, dan ketepatan pandangan anggota dewan pengawas syariah. Dengan formula yang di gunakan dalam penelitian (Lidyah et al., 2017) sebagai berikut :

$$\text{ICG-skor} = \text{KDPS} + \text{JADPS} + \text{KPDPS} + \text{KADPS} + \text{LADPS}$$

1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (KDPS)

Pengukuran dalam indikator ini yakni adanya keberadaan dewan pengawas syariah, apabila terdapat dewan pengawas syariah maka di beri skor 1, dan jika tidak terdapat dewan pengawas syariah di beri skor 0.

2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah (JADPS)

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam sebuah perbankan syariah. Pengukuran dalam indikator ini mengacu pada penelitian (Septyan, 2019). Jika jumlah anggota dewan pengawas syariah sebanyak 3 atau lebih maka

diberi skor 1, dan bila jumlah anggota dewan pengawas syariah kurang dari 3 maka diberik skor 0.

3) Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (KPDPS)

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang memiliki tingkat pendidikan yang baik atau tidak. dewan pengawas syariah diwajibkan memiliki tingkat pendidikan doktor (S3). Penelitian ini mengikuti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Farrok, dkk Lanis (2011) oleh (Lidyah et al., 2017). Bila terdapat anggota dewan pengawas syariah berpendidikan minimal doctor (S3) maka akan diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka akan diberi skor 0.

4) Keterpandangan Anggota Dewan Pengawas Syariah (KADPS)

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah terdapat anggota dewan pengawas syariah yang terpandang diantara para anggota lainnya. Dengan melihat apakah anggota dewan pengawas syariah juga ikut tergabung atau menjadi pengurus dalam Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN) yang dibentuk oleh MUI dan pengurus dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta menjadi pengurus pada lembaga Accounting, Auditing & Governance Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Bila terdapat keterpandangan anggota dewan pengawas syariah maka diberi skor 1, dan bila tidak terdapat maka diberi skor 0.

5) Lintas Anggota Dewan Pengawas Syariah (LADPS)

Pengukuran dalam indikator ini adalah dengan melihat apakah anggota dewan pengawas syariah memiliki rangkap jabatan menjadi dewan pengawas syariah pada perbankan syariah lainnya. Apabila terdapat salah satu dewan pengawas syariah yang memiliki lintas anggota dewan syariah maka di beri skor 1, dan sebaliknya apabila tidak ada lintas dewan pengawas syariah pada anggota dewan pengawas syariah maka di beri skor 0.

Secara ringkas, definisi operasional dan pengukuran variabel di atas teringkas dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Definisi operasional variable dan pengukuran variabel**

No	Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Sumber
1	Agresivitas Pajak	Tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak secara agresif, dengan cara illegal maupun legal	$ETR\ GAAP = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Penghasilan sebelum pajak}}$	(Arinta, 2018)
2	Komisaris independen	Komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan /tidak terafiliasi	$KMI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$	(Arinta, 2018)

3	Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional yakni kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi di luar perusahaan	$KI = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	(Octaviani & Sofie, 2019)
4	Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan manajerial yakni kepemilikan saham perusahaan oleh manajer perusahaan itu sendiri	$PKM = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	(Octaviani & Sofie, 2019)
5	<i>Islamic Corporate Governance</i> 1.KDPS 2.JADPS 3.KPDPS 4.KADPS 5.LADPS	Anggota dewan pengawas syariah institusi yang berasal dari eksternal perusahaan bank syariah.	$\text{ICG-Skor} = \text{KDPS} + \text{JADPS} + \text{KPDPS} + \text{KADPS} + \text{LADPS}$	(Lidyah et al., 2017)

### 3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik deskriptif .

### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik di gunakan untuk mendapatkan estimasi dan kesimpulan yang lebih tepat dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang di gunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Jika asumsi dalam penerapan model regresi dapat terpenuhi, maka dapat menghasilkan koefisien regresi yang linear, tidak bias, konsisten, serta efisien.

#### **3.6.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. cara untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi yaitu  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal, data akan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$  (Adiyani & Septanta, 2017).

#### **3.6.1.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi suatu korelasi diantara variabel bebasnya (Indradi, 2018). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dalam kedua pengukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel-variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak di jelaskan oleh variabel bebas lainnya. Maka nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $<0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $>10$ .

### 3.6.1.3 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Secara sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, Jika terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu maka terdapat masalah autokorelasi (Indradi, 2018).

#### 3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain (Indradi, 2018). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat di ketahui dengan melakukan uji glejser melalui SPSS yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel bebas, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

#### 3.6.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk analisa data dengan memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah di kumpulkan (Adiyani & Septanta, 2017). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, statistic deskriptif dilihat dari nilai rata-rata (mean), varian, maksimum, minimum, range, sum, kurtosis dan *skewness*. Pada penelitian ini menguji statistik deskriptif dimana ingin mengetahui *good corporate governance* yang meliputi komisariss independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *islamic corporate governance* dan agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.

### 3.6.3 Analisis regresi linier berganda

Dalam penelitian ini akan di uji menggunakan analisis linier berganda, analisis linier berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel terikat (Y) dan dua atau lebih variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4$ ). Persamaan yang di gunakan dalam regresi linier berganda di rumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Agresivitas pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 X_1$	= Koefisien regresi linier berganda Komisaris Independen
$\beta_2 X_2$	= Koefisien regresi linier berganda Kepemilikan Institusional
$\beta_3 X_3$	= Koefisien regresi linear berganda Kepemilikan Manajerial
$\beta_4 X_4$	= Koefisien regresi linear berganda <i>Islamic Corporate Governance</i>
e	= Standar error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Uji statistik t. Uji Statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Menurut (Adiyani & Septanta, 2017) analisis pengujian dilakukan dengan melihat hasil uji, apabila menunjukkan tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan apabila tingkat

signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Analisis juga dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien masing – masing variabel. Nilai koefisien berfungsi menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila hipotesis positif dan hasil uji menunjukkan nilai koefisien positif, maka hipotesis diterima. Begitu juga jika hipotesis negatif dan hasil uji menunjukkan nilai koefisien negatif, maka hipotesis diterima. Akan tetapi jika hipotesis positif dan hasil uji menunjukkan nilai koefisien negatif, maka hipotesis di tolak. Begitu juga apabila hipotesis negative dan hasil uji menunjukkan nilai koefisien positif, maka hipotesis di tolak. Untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial, dan *Islamic Corporate Governance*) terhadap variabel terikat (agresivitas pajak) yaitu dengan melakukan hipotesa sebagai berikut :

- a. Hipotesis diterima jika angka signifikan  $< 0,05$ , yang artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Hipotesis ditolak jika angka signifikan  $> 0,05$ , yang artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

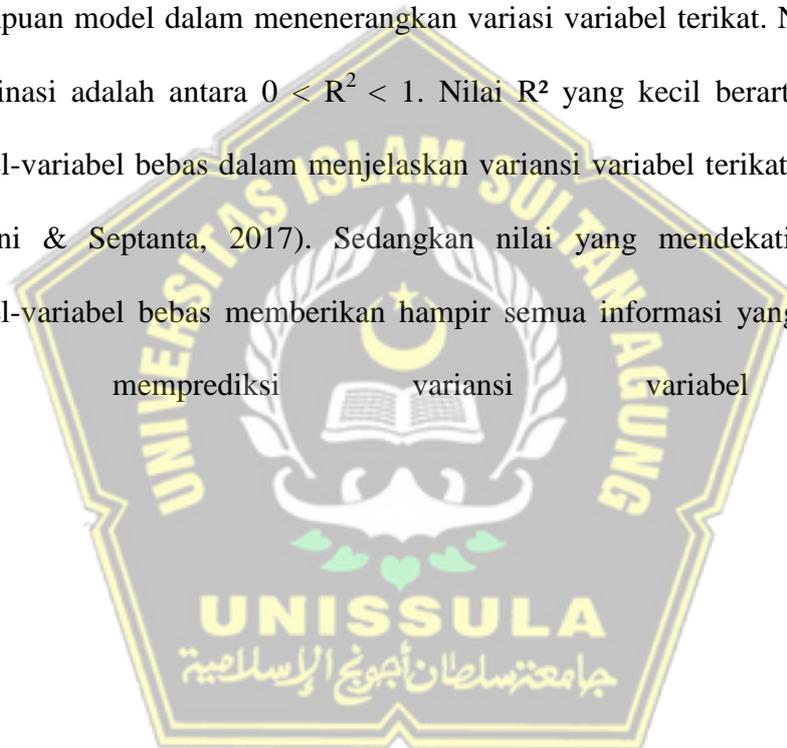
### 3.6.5 Uji Silmultan (Uji F)

Uji statistik F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian adalah :

- a. Jika signifikansi  $F < 0,05$ , maka model regresi adalah layak untuk penelitian.
- b. Jika signifikansi  $F > 0,05$ , maka model regresi adalah tidak layak untuk penelitian.

### 3.6.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas (Adiyani & Septanta, 2017). Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yakni pada perusahaan Bank Umum Syariah. Yang nantinya akan di ambil pada laporan keuangan periode 2016-2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu metode pengambilan sampel non random yang mengambil obyek dari dengan kriteria tertentu, dan di didapat 10 sampel perusahaan Bank Umum Syariah untuk selanjutnya yang akan di teliti, dapat dilihat pada ringkasan tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada OJK sampai dengan tahun 2019	14
2.	Menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dolar	(0)
3.	Tidak memenuhi kriteria (mengalami rugi dalam satu/lebih periode)	(4)
	Sample perusahaan	10
	Jumlah data (2016 – 2019)	40

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 Lampiran 1

Dari tabel 4.1 diatas diperoleh sampel penelitian dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan diperoleh sebanyak 10 sampel perusahaan Bank Umum

Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa keuangan. Dengan periode pengamatan selama 4 tahun berturut-turut maka dalam penelitian ini memiliki data sebanyak 40 yang di ambil dari Laporan Keuangan 10 Bank umum Syariah dengan periode 2016 sampai dengan 2019.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan nilai minimum, maksimum dan rata-rata sampel. Pada tabel di bawah ini adalah hasil dari statistik deskriptif dari variabel *Good corporate Governance* sebagai variabel bebas meliputi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *Islamic corporate governance* sebagai variabel bebas dan Agresivitas Pajak sebagai variabel terikat.

**Tabel 4.2**

#### Deskriptive Statistics

		KMI	KI	KM	ICG	ETR
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		.6113	.9989	.0002	3.7500	.2534
Mode		.50	1.00	.00	4.00	.16 <sup>a</sup>
Std. Deviation		.15531	.00204	.00127	.95407	.04171
Minimum		.25	.99	.00	2.00	.16
Maximum		1.00	1.00	.01	5.00	.33

Sumber : Output SPSS 16 Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata komisaris independen adalah 0,6113 Dan nilai komisaris independen tertinggi sebesar 1,00

dan nilai terendah sebesar 0,25. Nilai standar deviasi (0.15531). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) pada perusahaan sampel sudah sesuai dengan ketentuan (Peraturan Bank Indonesia no. 11/33/PBI, 2009). bahwa jumlah anggota dewan komisaris adalah minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi serta paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

Nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah 0,9989. Tingkat kepemilikan institusional tertinggi sebesar 1,00 dan terendah sebesar 0,99. Nilai standar deviasi (0,00204). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel rata-rata dimiliki oleh pihak institusi dengan porsi kepemilikan saham sebesar 99,89%. Dengan demikian rata-rata kepemilikan saham pada Bank Umum Syariah (BUS) dikuasai oleh pihak institusi.

Nilai rata-rata kepemilikan manajerial adalah 0,0002. Tingkat kepemilikan manajerial tertinggi sebesar 0,01 dan terendah 0,00. Nilai standar deviasi (0,00127). Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hanya sebesar 0,02% dari 40 jumlah sampel perusahaan, dengan nilai tertinggi 1%. Dengan demikian dapat dikatakan kebanyakan Bank Umum Syariah (BUS) tidak memiliki kepemilikan saham manajerial dan hanya bank bukopin syariah sebesar 0,01 atau 1%.

Nilai rata-rata *Islamic Corporate Governance* adalah 3,7500. Tingkat *Islamic Corporate Governance* tertinggi dalam perusahaan sebesar 5.00 dan terendah sebesar 2.00. dengan nilai Modus 4 Nilai standar deviasi (0,95407). Hal ini menunjukkan bahwa dalam *Islamic corporate governance* yang dilihat melalui

besaran komposisi dewan pengawas syariah pada 40 sampel perusahaan dengan indikator skor menunjukkan skor yang sering muncul adalah 4 dan memiliki nilai rata-rata 3,7%. Artinya kebanyakan Bank Umum Syariah (BUS) telah memenuhi kriteria dalam pengukuran *Islamic corporate governance*.

Nilai rata-rata agresivitas pajak adalah 0,2534. Tingkat agresivitas pajak tertinggi sebesar 0,33 dan terendah sebesar 0,16. Nilai standar deviasi (0,04171). Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah pada perusahaan sampel tidak cenderung melakukan agresivitas pajak, karena semakin besar nilai ETR maka semakin kecil adanya tindakan agresivitas pajak. Nilai terbesar (maximum) sebesar 0,33 pada Bank BRI syariah (2017) dan Bank Jabar Banten syariah (2019) dan nilai terkecil (minimum) sebesar 0,16 pada Bank Aceh syariah (2016).

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Adapun pengujian terhadap asumsi klasik dengan program SPSS yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Untuk mengetahui normal atau tidaknya penyebaran data variabel dependen digunakan uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik

*Kolmogorov Smirnov* (K-S). Adapaun pedoman pengambilan keputusan data dikatakan normal adalah jika nilai signifikan yang di peroleh lebih dari 0,05.

Hasil di tabel 4.2 dibawah menunjukkan bahwa nilai *unstandardized residual* memiliki angka probabilitas (*Kolmogorov-smirnov*) sebesar 0,101 > taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa penyebaran data variabel dependen dapat dikatakan terdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan untuk dilakukan pengujian regresi linier.

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03298855
Most Extreme Differences	Absolute	,193
	Positive	,193
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		1,223
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101

Sumber : Output SPSS 16 Lampiran 2

#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila model regresi yang bebas dari multikolinearitas maka dapat di katakana model regresi yang baik. Uji multikolinieritas dapat diketahui dari hasil besarnya nilai *Tolerance* dan VIF

(*Variance Inflation Factor*). Uji multikolinieritas dapat di katakan bebas dari multikolinieritas Jika nilai *Tolerance* Lebih dari 0,10 dan jika nilai VIF kurang dari 10,00.

Berdasarkan Tabel 4.4 dibawah dapat diketahui bahwa variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini yang terdiri dari *Good Corporate Governance* yang meliputi (Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajerial) dan *Islamic Corporate governance* tidak terjadi multikolinieritas karena hasil dari nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan  $VIF < 10,00$ .

**Tabel 4.4**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KMI	,891	1,122
KI	,897	1,115
KM	,961	1,040
ICG	,962	1,039

Sumber: Output SPSS 16 Lampiran 2

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin Watson.

**Tabel 4.5****Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson	Durbin-Watson (Cochrane Orcutt)
1	,612 <sup>a</sup>	,374	,303	1,081	2,084

Sumber: Output SPSS 16 Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil DW *test* (Durbin Watson *test*) sebesar 1,081. Dengan nilai tabel (*du*) sebesar 1,7209, hal ini menunjukkan bahwa  $du > d$ , artinya bahwa hasil uji tidak memenuhi syarat dan dapat dikatakan terjadi autokorelasi. Maka langkah untuk menyelesaikan masalah autokorelasi pada penelitian ini digunakan metode *Cochrane orcutt*. Menurut (Ghozali, 2018), *cochrane orcutt* adalah metode penyelesaian masalah autokorelasi dengan memasukkan lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebasnya.

Dan berdasarkan hasil pengujian setelah dilakukan perbaikan autokorelasi dengan menggunakan metode *Cochrane orcutt* diperoleh nilai durbin Watson sebesar 2.084 ( $du = 1,7209$ ;  $4-du = 2,2791$ ). Hal ini berarti model *regresi* di atas setelah dilakukan metode *chochrane-orcutt* sudah tidak terdapat masalah autokorelasi, karena angka DW *test* (2,084) berada diantara *du* tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,7209 dan *4-du tabel* sebesar 2,2791 oleh karena itu model *regresi* ini dinyatakan layak untuk dipakai.

#### 4.3.5 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan epengamatan lain. Jika variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. dan jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.6**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-1.982	1.115	-1.777	.085
LAGKMI	-.006	.025	-.262	.795
LAGKI	3.676	2.045	1.798	.081
LAGKM	-.942	2.242	-.420	.677
LAGICG	-.001	.004	-.263	.794

Sumber: Output SPSS 16 Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas, yaitu *Good Corporate Governance* meliputi (Komisaris Independent, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial) dan *Islamic Corporate Governance* > 0,05. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen *Good Corporate Governance* meliputi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *Islamic Corporate Governance* terhadap variabel dependen Agresivitas pajak.

##### 4.4.1 Persamaan Regresi Linear Berganda

Hasil persamaan regresi linear berganda dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	1,799	1,819	,330
Komisaris Independen	-,019	,040	,641
Kepemilikan Institusional	-3,105	3,334	,358
Kepemilikan Manajerial	9,643	3,656	,013
<i>Islamic Corporate Governance</i>	,020	,007	,006

Sumber: Output SPSS 16

Dari tabel menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$Y = 1,799 - 0,019 X_1 - 3,105 X_2 + 9,643 X_3 + 0,020 X_4 + e$$

Keterangan :

X1 : Komisaris Independen

X2 : Kepemilikan Institusional

X3 : Kepemilikan Manajerial

X4 : *Islamic Corporate Governance*

e : Standart error

Dari Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut bernilai positif sebesar 1,799 dengan nilai probabilitas value (sig 0,330), berarti konstanta di anggap nol. Artinya jika variabel bebas komisaris independen (X1), kepemilikan institusional (X2), Kepemilikan manajerial (X3), dan *Islamic Corporate Governance* (X4) konstan atau tetap dan agresivitas pajak sebesar nol.
2. Nilai koefisien komisaris independen (X1) sebesar -0,019 bernilai negatif dengan nilai signifikansi 0,641 ( $>0,05$ ) artinya bahwa komisaris independen (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). komisaris independen mengindikasikan bahwa fungsi komisaris independen sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maka keberadaan komisaris independen ini tidak memiliki kaitan secara langsung dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

3. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X2) sebesar -3,105 bernilai negatif dengan nilai signifikansi 0,358 ( $>0,05$ ) artinya bahwa kepemilikan institusional (X2) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Dengan demikian kepemilikan institusional yang juga sebagai pengawas dari luar perusahaan tidak memiliki kaitan secara langsung dalam melakukan tindakan-tindakan agresivitas pajak pada perusahaan.

4. Nilai koefisien Kepemilikan manajerial (X3) sebesar 9,643 bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,013 ( $<0,05$ ) artinya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Hal ini berarti semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya.

5. Nilai koefisien *Islamic Corporate Governance* (X) 0,020 bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,006 ( $<0,05$ ) artinya bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Artinya bahwa semakin besar tingkat *Islamic corporate governance* maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan dan tindakan agresivitas dapat terkondisikan.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

**Tabel 4.8**

Uji t

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		.989	.330
Komisaris Independen	-.071	-.471	.641
Kepemilikan Institusional	-.141	-.931	.358
Kepemilikan Manajerial	.378	2.637	.013
<i>Islamic Corporate Governance</i>	.416	2.901	.006

Sumber: Output SPSS 16

### 1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Bedasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,071 dan nilai t sebesar -0,471 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,641 lebih tinggi dari 0,05 maka,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Bedasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0,141 dan nilai t sebesar -0,931 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,358 lebih tinggi dari 0,05 maka,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak artinya bahwa secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.

Bedasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,378 dan nilai t sebesar 2,637 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,13 lebih

rendah dari 0,05 maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa secara parsial Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### 4. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak.

Bedasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,416 dan nilai t sebesar 2,901 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih rendah dari 0,05 maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa secara parsial *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

#### 4.6 Uji simultan (Uji F)

Tabel 4.9

Uji F

Model	Sum of Squares	Df	F	Sig.
1 Regression	.016	4	4.072	.008 <sup>a</sup>
Residual	.033	34		
Total	.049	38		

Sumber: Output SPSS 16

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,008 ( $< 0,05$ ) dan nilai F hitung 4,072 ( $> F$  tabel 2,63). Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel bebas *good*

*corporate governance* yang meliputi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *Islamic corporate governance* secara simultan terhadap agresivitas pajak pada bank umum syariah (BUS). Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini dinyatakan layak sebagai model penelitian karena hasil Uji F adalah Signifikan.

#### 4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.10**  
**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,569 <sup>a</sup>	,324	,244	,03113

Sumber : Output SPSS 16

Pada tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,224 berarti bahwa besarnya kontribusi pengaruh *Good corporate Governance* yang meliputi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *Islamic corporate governance* terhadap agresivitas pajak hanya sebesar 24,4% dan sisanya  $100\% - 24,4\% = 75,6\%$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain variabel pada penelitian ini.

## 4.8 Pembahasan

Secara ringkas, dari analisis terhadap variabel - variabel independen diperoleh hasil bahwa *Good corporate governance* pada proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Adapun variabel *Islamic corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan keberadaan komposisi dewan pengawas syariah dengan hasil *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar komposisi dewan pengawas syariah maka prinsip syariah yang diterapkan pada perbankan syariah dalam hal tata kelola islam akan semakin tinggi sehingga tindakan-tindakan agresivitas dapat terkondisi.

### 4.8.1 Pengaruh Komisaris independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS, maka dapat disimpulkan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi komisaris independen sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tindakan agresivitas pajak. Ketidakmampuan komisaris independent dalam mengendalikan Tindakan agresivitas pajak kemungkinan disebabkan terbatasnya pengawasan dan

banyaknya pihak-pihak yang terafiliasi yang mendominasi sehingga mampu untuk mengendalikan komisaris independen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Tiaras & Wijaya, 2017) dengan hasil “komisaris independen tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak”. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Rosidy, 2019) komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

#### **4.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Menurut (Pratiwi & Ardiyanto, 2019) menyebutkan bahwa pemegang saham institusi akan memiliki ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku maka investor institusi akan mendorong perusahaan untuk mentaati aturan perpajakan. Hal ini juga dapat mengakibatkan bahwa jika tindakan agresivitas pajak terjadi diperusahaan dengan jangka panjang juga akan memberikan dampak yang akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari (Setu, Endang, 2019) dan (Octaviani & Sofie, 2019) dengan hasil “Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak”. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indra Gunawan, Mukhzarudfa,

2019) dengan hasil “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak”

#### **4.8.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap agresivitas pajak**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan dalam manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya dan manajemen mendapat control penuh oleh pemilik institusi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Ayu & Sumadi, 2019) dan (Atari, 2016) dimana hasil penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa “kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak”. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani & Sofie, 2019) dengan hasil “kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak”.

#### **4.8.4 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak**

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan *Islamic corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar *Islamic corporate governance* dimana semakin tinggi nilai islam di terapkan dalam perusahaan maka tindakan agresivitas pajak dapat terkondisikan.

Menurut (Salman et al., 2018), *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap tinggi rendahnya praktik agresivitas pajak. keberadaan dewan pengawas syariah dalam penerapan prinsip islam sangat penting sebagai badan penyeimbang yang mengawasi segala bentuk kegiatan operasional bank syariah, sehingga perlu dukungan dan fasilitas yang memadai untuk membantu memaksimalkan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian dari (Arinta, 2018) dengan hasil “*Islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak” .



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* dan *Islamic corporate governance* terhadap agresivitas pajak, dimana variabel *good corporate governance* dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan variabel *Islamic corporate governance* diukur dengan keberadaan dewan pengawas syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah pada perusahaan sampel tidak cenderung melakukan agresivitas pajak, karena semakin besar nilai ETR maka semakin kecil adanya tindakan agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan ETR rata-rata sebesar 25,34%. Tingkat agresivitas pajak tertinggi sebesar 33% dan terendah sebesar 16%. Bahwa semakin besar nilai ETR maka semakin kecil adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan perbankan syariah.
2. Berdasarkan hasil penelitian dari variabel-variabel bebas yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak diketahui bahwa variabel *Good Corporate Governance* dengan proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional secara parsial tidak memiliki pengaruh

terhadap adanya tindakan agresivitas pajak, sedangkan pada proporsi kepemilikan manajerial bahwa semakin besar tingkat kepemilikan manajerial maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. Dan pada *Islamic Corporate Governance* menunjukkan bahwa semakin besar keberadaan Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin tinggi tata kelola Islam yang di jalankan sehingga semakin ketat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi tindakan Agresivitas Pajak.

## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, dikarenakan populasi yang digunakan pada Bank Syariah maka ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih di perhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

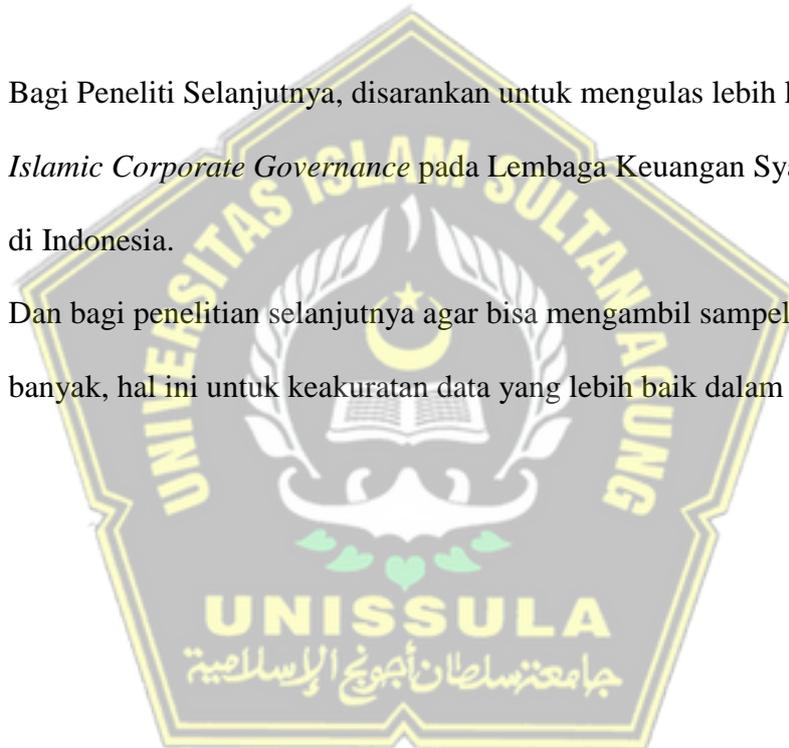
1. Tentunya pada *Islamic Corporate Governance*, karena pada penelitian ini hanya di fokuskan pada Bank Umum Syariah. Dan tidak mencakup semua Lembaga Keuangan Syariah yang ada.

2. Jumlah sampel yang hanya 10, karena pengambilan sample pada Bank Umum Syariah menggunakan metode *purposive sampling* maka hanya 10 sampel yang memenuhi kriteria dengan jumlah data 40.

### 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang disarankan bagi penelitian selanjutnya :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengulas lebih luas mengenai *Islamic Corporate Governance* pada Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia.
2. Dan bagi penelitian selanjutnya agar bisa mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- 177/M-MBU/, S. M. N. (2002). Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117 / M-MBU / 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Menetri BUMN*, 15.
- Adiyani, N., & Septanta, R. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 5(1), 17–35. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/555>
- Arinta, Y. N. (2018). *BISNIS*, Vol. 6 No. 2, Des 2018 69. 6(2), 69–86.
- Atari, J. (2016). *Faculty of Economic, Riau University*, 4(1), 294–308.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran pajak. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Chintya Zara Ananda & Erinoss NR. (2020). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE dan ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA dan REPUTASI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA SKRIPSI*. 6(1), 5–9.
- Dridi, W., & Boubaker, A. (2015). Corporate Governance and Book-Tax Differences: Tunisian Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 8(1), 171. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n1p171>
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>
- Fadhistri, K. A., Triyanto, D. N., & Acc, M. (2019). *PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP INDIKASI TERJADINYA FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI ( Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017 ) THE EFFECT OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND SHARIA COMPLIANCE ON FRAUD I*. 6(2), 3265–3272.
- FCGI. (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan ). *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, II(2002), 37.
- Ghozali. (2018). Analisis Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Pulau Lombok. *Valid*, 15(1), 46–57.

- Goh, Nainggolan, D., & Sagala. (2019). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2018. *Thomas. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Haribowo, I. (2016). ANALISIS PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia). *Esensi*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338>
- Indra Gunawan, Mukhzarudfa, dan I. W. (2019). *The effect of good corporate governance on dividend policy*. 1–10. <https://doi.org/10.2991/insyma-19.2019.15>
- Indradi, D. (2018). PENGARUH LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK ( Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>
- International, T. H. E., Of, J., & Business, A. (2018). *The international journal of applied business tijab*. 2(April).
- Lidyah, R., Akbar, D. A., & Africano, F. (2017). Islamic Governance , Investment Account Holder , Profitability , Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Bank Umum Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Bisnis, Dan Desain 2017*, 1–30.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Maulana, I. A. (2020). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate*. 11(2), 155–163.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., Saputra, R. D., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(III), 242–267.
- No.8/4/PBI/, P. B. I. (2006). *Peraturan bank indonesia nomor 8/4/pbi/2006 tentang pelaksanaan*. 1–5.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi

Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65.  
<https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>

Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. *Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Dengan Keputusan Transfer Pricing*, 1(1), 63–76.

Octaviani, R. R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>

Peraturan Bank indonesia no. 11/33/PBI. (2009). No Title *التقويم في وتد بيقات م فاهيم*. *Aspectos Generales De La Planificación Tributaria En Venezuela*, 2009(75), 31–47.

Pratiwi, D. A., & Ardiyanto, M. D. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–13.

Rayhan, Arfan, M., & Saputra, M. (2017). Bank Umum Syariah di Indonesia. *Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 6,(1), 61–66.

Salman, K. R., Surabaya, S. P., & Anshori, M. (2018). *The new influence of the level of islamic governance to the level of tax aggressiveness and level of corporate social responsibility*. November. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1341638>

Septyan, K. (2019). Determinasi Tingkat Pengungkapan Bank Syariah Di Beberapa Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 127–142.  
<https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.2>

Setu, Endang, dan A. (2019). “J. R. of Cork.” *Notes and Queries*, s1-IX(228), 217.  
<https://doi.org/10.1093/nq/s1-IX.228.217-a>

Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>

Yunistina, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/9610>

## Lampiran 1. Cek List Data

No	Kode	Nama Perusahaan	Menerbitkan LK			
			2016	2017	2018	2019
1.	116	PT. Bank Aceh Syariah	V	V	V	V
2.	128	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	V	-	-	V
3.	147	PT. Bank Muamalat Indonesia	V	V	-	-
4.	405	PT. Bank Victoria Syariah	V	V	-	-
5.	422	PT. Bank BRI Syariah	V	V	V	V
6.	425	PT. Bank Jabar Banten Syariah	V	V	V	V
7.	427	PT. Bank BNI Syariah	V	V	V	V
8.	451	PT. Bank Syariah Mandiri	V	V	V	V
9.	506	PT. Bank Mega Syariah	V	V	V	V
10.	517	PT. Bank Panin Dubai Syariah	V	V	-	V
11.	521	PT. Bank Syariah Bukopin	V	V	V	V
12.	536	PT. BCA Syariah	V	V	V	V
13.	547	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	V	V	V	V
14.	947	PT. Maybank Syariah Indonesia	V	V	V	V

Jumlah Perusahaan Perbankan Syariah = 14 Perusahaan

Mengalami rugi pada periode tertentu = 4 Perusahaan (Bank NTB syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah)

Sampel = 10 Perusahaan

## Lampiran 2. Hasil SPSS 2016

		KMI	KI	KM	ICG	ETR
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		.6113	.9989	.0002	3.7500	.2534
Median		.6000	1.0000	.0000	4.0000	.2548
Mode		.50	1.00	.00	4.00	.16 <sup>a</sup>
Std. Deviation		.15531	.00204	.00127	.95407	.04171
Minimum		.25	.99	.00	2.00	.16
Maximum		1.00	1.00	.01	5.00	.33
Sum		24.45	39.96	.01	150.00	10.14

Percentiles	25	.5000	.9980	.0000	3.0000	.2373
	50	.6000	1.0000	.0000	4.0000	.2548
	75	.6667	1.0000	.0000	4.0000	.2714

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03298855
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		1.223
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101

a. Test distribution is Normal.

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.801	2.874		.975	.336		
KMI	-.047	.038	-.174	-1.228	.228	.891	1.122
KI	-2.609	2.882	-.128	-.905	.371	.897	1.115
KM	9.064	4.496	.275	2.016	.052	.961	1.040
ICG	.023	.006	.519	3.811	.001	.962	1.039

a. Dependent

Variable: ETR

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.612 <sup>a</sup>	.374	.303	.03482	1.081

a. Predictors: (Constant), ICG, KI, KM, KMI

b. Dependent Variable: ETR

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.569 <sup>a</sup>	.324	.244	.03113	2.084

a. Predictors: (Constant), LAGICG2, LAGKMI2, LAGKM2, LAGKI2

b. Dependent Variable: LAGETR2

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.982	1.115		-1.777	.085
	LAGKMI	-.006	.025	-.046	-.262	.795
	LAGKI	3.676	2.045	.314	1.798	.081
	LAGKM	-.942	2.242	-.069	-.420	.677
	LAGICG	-.001	.004	-.043	-.263	.794

a. Dependent Variable: ABSRES

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.799	1.819		.989	.330
	LAGKMI2	-.019	.040	-.071	-.471	.641

LAGKI2	-3.105	3.334	-.141	-.931	.358
LAGKM2	9.643	3.656	.378	2.637	.013
LAGICG2	.020	.007	.416	2.901	.006

a. Dependent Variable: LAGETR2

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.016	4	.004	4.072	.008 <sup>a</sup>
	Residual	.033	34	.001		
	Total	.049	38			

a. Predictors: (Constant), LAGICG2, LAGKMI2, LAGKM2, LAGKI2

b. Dependent Variable: LAGETR2

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.569 <sup>a</sup>	.324	.244	.03113

a. Predictors: (Constant), LAG\_ICG, LAG\_KMI, LAG\_KM, LAG\_KI

#### Lampiran 3. Tabulasi Data

NO	TAHUN	KODE	KMI	KI	KM	ICG	ETR
1	2016	BCAS	0.666667	1	0	3	0.207674
2	2017	BCAS	0.666667	1	0	3	0.230452
3	2018	BCAS	0.666667	1	0	3	0.193751
4	2019	BCAS	0.666667	1	0	3	0.193313
5	2016	BNIS	0.5	1	0	4	0.25676
6	2017	BNIS	0.25	1	0	4	0.249692
7	2018	BNIS	0.4	1	0	4	0.243818
8	2019	BNIS	0.6	1	0	5	0.246011
9	2016	BRIS	0.6	1	0	3	0.286661

10	2017	BRIS	0.75	1	0	4	0.330332
11	2018	BRIS	0.75	0.996715	0	4	0.296435
12	2019	BRIS	0.5	0.996715	0	4	0.306654
13	2016	BTPNS	0.666667	1	0	2	0.257759
14	2017	BTPNS	0.5	1	0	3	0.262481
15	2018	BTPNS	0.5	0.997337	0	3	0.256892
16	2019	BTPNS	0.5	0.998325	0	3	0.25482
17	2016	BSB	0.5	0.997337	0.008007	3	0.316175
18	2017	BSB	0.5	0.997922	0.000268	4	0.236941
19	2018	BSB	0.5	0.998711	0.000207	4	0.312118
20	2019	BSB	0.666667	0.997563	0	4	0.310305
21	2016	BJBS	0.5	1	0	4	0.240419
22	2017	BJBS	0.5	1	0	4	0.313412
23	2018	BJBS	0.5	1	0	4	0.274379
24	2019	BJBS	0.666667	1	0	5	0.333745
25	2016	BMS	0.6	1	0	5	0.251413
26	2017	BMS	0.75	1	0	5	0.250265
27	2018	BMS	0.75	1	0	5	0.258075
28	2019	BMS	0.5	1	0	5	0.256543
29	2016	BMSI	0.666667	1	0	5	0.248007
30	2017	BMSI	1	1	0	5	0.247604
31	2018	BMSI	1	1	0	4	0.232832
32	2019	BMSI	1	1	0	5	0.238508
33	2016	BSMI	0.5	0.992877	0	4	0.259113
34	2017	BSMI	0.5	0.992877	0	4	0.261479
35	2018	BSMI	0.5	0.992877	0	4	0.254756
36	2019	BSMI	0.5	0.997288	0	4	0.259673
37	2016	BAS	0.666667	1	0	2	0.164603
38	2017	BAS	0.666667	1	0	2	0.186056
39	2018	BAS	0.666667	1	0	2	0.186659
40	2019	BAS	0.666667	1	0	2	0.171335